

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BAGAN DAN BURUH NELAYAN**  
**DALAM UPAYA MENCUKUPI EKONOMI KELUARGA**  
**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
**(Studi di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**DIAN EKA WATI**

**NPM: 1251010082**

**Jurusan: Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1439H/2018M**

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BAGAN DAN BURUH NELAYAN  
DALAM UPAYA MENCUKUPI EKONOMI KELUARGA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439H / 2018 M**

## ABSTRAK

Salah satu kegiatan ekonomi adalah kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil baik secara *mudharabah* maupun *syirkah* yang sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan di kecamatan Kotaagung merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencukupi ekonomi keluarga. Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung? Dan bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai praktik sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan dalam upaya mencukupi ekonomi keluarga buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung? untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung. Dan Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem bagi hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan jenis penelitian penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 25 responden dari seluruh jumlah populasi dan teknik pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan berfikir deduktif.

Hasil temuan penelitian ini yaitu praktik kerjasama sistem bagi hasil suatu kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh. Untuk masalah bagi hasil, sudah diatur berdasarkan adat kebiasaan setempat dan di sepakati bersama yakni hasil dibagi dua yaitu 50:50 kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dan 60:40 modal keseluruhan dari pemilik bagan, Proses transaksi kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kotaagung dapat di kategorikan sebagai kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadis serta tidak mengandung mudharat. Dan dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik bagan dan buruh nelayan, maka kerjasama sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan di bolehkan dan sesuai dengan ekonomi Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari praktik kerjasama sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung cukup membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup para buruh nelayan, keadaan perekonomian dapat dikatakan cukup lebih membaik.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl.Let.Kol.H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

Untuk membimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan yang relevan dan secukupnya tentang skripsi ini, maka skripsi saudara:

Nama : **DIAN EKA WATI**

NPM : **1251010082**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jurusan : **Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BAGAN  
DAN BURUH NELAYAN DALAM UPAYA  
MENCUKUPI EKONOMI KELUARGA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kecamatan  
Kotaagung Kabupaten Tanggamus)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Ahmad Habibi, S.E., M.E.**

**NIP.19790514 200312 1 003**

Pembimbing II

**A. Zuliansyah, S.Si., M.M.**

**NIP.19830222 200912 1 003**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

**MADNASIR, S.E., M.Si.**

**NIP.19750424 200212 1 001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl.Let.Kol.H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul: **SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BAGAN DAN BURUH NELAYAN DALAM UPAYA MENCUKUPI EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)**, disusun oleh: **Dian Eka Wati, NPM: 1251010082**, Program Studi: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Selasa, 19 Desember 2017.**

**TIM DEWAN PENGUJI:**

Ketua : **Prof.Dr.H. Suharto,S.H.,M.A** (.....)

Sekretaris : **Okta Suprianingsih,M.E.Sy** (.....)

Penguji 1 : **Syamsul Hilal,M.Ag** (.....)

Penguji II : **Ahmad Habibi,S.E.,M.E** (.....)

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Dr. Moh. Bahrudin., M.A**  
**NIP. 195805241989031003**



## MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (QS. Al-Jumuah :10)

*Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010, h.124

## PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT dan karya tulis ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendukung terselesaikannya karyatulis ini diantaranya :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Bukhori dan Ibunda Yunani terimakasih untuk cinta, kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, dukungan, nasihat, didikan, do'a restu dan jasa jasa-jasamu yang tidak terhingga demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu.
2. Kakak dan adik sepupuku Riki Gusnawan,A.Md, Mau Kurnia, Meliyasari, Arsil Azim, Ayu Wardhani, Ridho Esa Putra Arahman, Sangga Pandia Arahman, Ayla Fitri dan keponakanku Rafa Arjuna Mulia  
Terimakasih atas do'a dan restu, canda, kasih sayang, persaudaraan dan dukungan yang selama ini kalian berikan semoga kita semua bisa membuat orang tua kita tersenyum bahagia dan bangga memiliki anak-anak seperti kita.
3. Untuk keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu ku banggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Kaurgading Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus pada tanggal 04 Juli 1994. Penulis merupakan anak Tunggal dari bapak Bukhori dan Ibu Yunani. Penulis kini bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Adapun jenjang pendidikan penulis yaitu:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kaurgading Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2006.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2009.
3. Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2012.
4. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung jurusan ekonomi syariah sampai sekarang.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmannirrohim* Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas rahmat dan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya dan semoga kita tergolong umatnya, amin.

Penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.,A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir,S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat demi menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Habibi,S.E.,M.E selaku dosen Pembimbing 1 dan A.Zuliansyah,S.Si.,M.M selaku dosen Pembimbing II, penulis ucapkan ribuan terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Pemimpin perpustakaan beserta karyawan, baik perpustakaan fakultas maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu buku-buku literatur.
5. Firdaus,S.Pd selaku Camat Kotaagung Kabupaten Tanggamus, seluruh masyarakat terimakasih atas kerjasama serta diizinkannya penulis melakukan penelitian di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.
6. Seluruh dosen fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Muhammad Tamimi,S.Pd terimakasih selalu mendukung, memotivasi, dan berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini serta yang selalu menantikan keberhasilanku dalam mengapai cita-cita.
9. Teman dan sahabat-sahabatku Eti Winarni,S.E Harmilawati,S.Pd Yeyen Viona,S.Pd Siti Rohamah,S.E Ismy Akhita Fajarwati,S.Pd Mirna Yunita,S.Pd.



Wantika,S.Pd Siti Masitoh,S.E Nizron,S.Pd dan Agus Pramudia,S.Pd (Ketua Umum HMI Komisyariat Tarbiyah) .

10. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2012 jurusan Ekonomi Syariah khususnya kelas B.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun penulis saat ini telah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna dimasa mendatang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi masyarakat nelayan dan bagi pembaca pada umumnya

Bandar Lampung, 27 Oktober 2017  
Penulis

Dian Eka Wati  
NPM.1251010082

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Metodologi Penelitian.....	12

### **BAB II: EKONOMI ISLAM TENTANG BAGI HASIL DAN EKONOMI KELUARGA**

A. Konsep Islam Tentang Bagi Hasil .....	23
1. Akad <i>Mudharabah</i> .....	24
a. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	27
b. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	28
c. Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	33
d. Macam-Macam <i>Mudharabah</i> .....	33
e. Operasional <i>Mudharabah</i> .....	33
f. Berakhirnya <i>Mudharabah</i> .....	35
2. Akad <i>Syirkah</i> .....	36
a. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	37
b. Rukun Dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	38
c. Macam-Macam <i>Syirkah</i> .....	40
d. Operasional <i>Syirkah</i> .....	41
e. Berakhirnya <i>Syirkah</i> .....	42
B. Ekonomi Keluarga	
1. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.....	43
2. Landasan Pengembangan Ekonomi Keluarga.....	45
3. Standar Kecukupan Ekonomi Keluarga .....	46
4. Kiat-Kiat Mencukupi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga .....	48
5. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga .....	51



### **BAB III : PENYAJIAN DATA**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Kotaagung.....55
- B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan Di Kecamatan Kotaagung

### **BAB IV : ANALISIS DATA**

- A. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Buruh Nelayan Kecamatan Kotaagung.....66
- B. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam.....75

### **BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....87
- B. Saran-Saran .....88

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terdapat di dalam judul. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah berjudul **“SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BAGAN DAN BURUH NELAYAN DALAM UPAYA MENCIKUPLEKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

##### 1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil (*profil and loss sharing*) adalah suatu kesepakatan antara pemilik modal (surplus spending unit) dengan pekerja atau pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha, yang apabila kegiatan usaha menghasilkan, maka keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung



bersama.<sup>1</sup>

## 2. Pemilik Bagan

Pemilik bagan yang dimaksud dalam Skripsi ini yaitu pemilik modal atau pemilik perahu atau alat tangkap ikan, dimana ia menanam modal cukup besar berupa seperangkat peralatan penangkapan ikan tanpa ikut mengoperasikan alat tangkap tersebut dan tinggal menerima setoran dari buruh atau pekerja.

## 3. Buruh Nelayan

Buruh disebut juga pekerja atau karyawan, adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi dan modal tetapi memiliki tenaga yang terjual kepada juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut. Ciri dari buruh nelayan ini adalah bahwa mereka mengabdikan dirinya kepada orang-orang yang dilayaninya yaitu kelompok nelayan pemilik bagan.

## 4. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga yaitu suatu keadaan pendapatan atau penghasilan sebuah keluarga untuk membiayai seluruh kebutuhan keluarga, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Terpenuhinya kebutuhan material akan memudahkan keluarga melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan, termasuk pelaksanaan

---

<sup>1</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 26

ibadah dan pemenuhan kesejahteraan.<sup>2</sup>

## 5. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam dalam Skripsi ini maksudnya yaitu ditinjau dari sudut pandang ekonomi keislaman, yakni, sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai normatif ajaran Islam yang bertujuan memberdayakan ekonomi umat Islam secara adil.<sup>3</sup> Artinya, sistem bagi hasil antara pemilik bagan dengan buruh akan ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam.

## 6. Kecamatan Kotaagung

Kecamatan Kotaagung yaitu suatu wilayah pemerintahan tingkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Berdasarkan penegasan masing-masing istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini, maka secara keseluruhan yang dimaksud dari judul ini adalah: Suatu penelitian mengenai sistem bagi hasil antara pemilik modal atau bagan dengan pekerja atau buruh nelayan dengan tujuan mencukupi ekonomi keluarga buruh nelayan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam yang menekankan pada prinsip musyawarah dan keadilan. Penelitian ini akan dilakukan pada pemilik bagan dan buruh nelayan di wilayah Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>2</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, h.35

<sup>3</sup> Mohamad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta, 2010, h. 8

## B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan dipilihnya judul skripsi ini untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yaitu:

1. Sistem bagi hasil pada dasarnya merupakan alternatif dari sistem bunga bank, namun dalam pelaksanaan di lapangan seringkali prinsip bagi hasil ini tidak sejalan dengan prinsip musyawarah dan keadilan sehingga ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Di berbagai tempat, sistem bagi hasil berbeda-beda penerapannya. Hal ini menarik untuk diteliti.
2. Sistem bagi hasil antara para pemilik bagan dan para buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, berdasarkan hasil pra-penelitian, ditemukan adanya indikasi yang menyalahi prinsip sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam dimana perolehan bagan jauh lebih besar ketimbang perolehan buruh dan ini menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelitinya lebih dalam.

## C. Latar Belakang Masalah

Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan konferensi PBB tentang hukum laut (*UNCLOS*) 1982 dengan luas wilayah nasional 5,0 juta km<sup>2</sup> yaitu terdiri 3,1 juta km<sup>2</sup> perairan nasional, dan Zona Ekonomi Eksklusif (*ZEE*) 5,8 juta



km<sup>2</sup>. Luasnya lautan yang menyimpan berbagai kekayaan laut dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, tambang minyak, dan sebagainya. Keadaan ini sangat signifikan dalam menunjang pembangunan sosial, ekonomi, menuju keluarga yang sejahtera.<sup>4</sup>

Sebagai bangsa yang memiliki lautan yang luas dan daratan yang subur sudah semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Hal ini tidak wajar manakala kekayaan sedemikian besarnya ternyata tidak mensejahterakan. Sebuah kehancuran negeri yang kaya adalah jika rakyatnya miskin, tanahnya subur namun pangannya mahal. Sebagai negara maritim Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. Desa di Indonesia berjumlah 67.439 desa dan sekitar 9.261 desa yang dikategorikan sebagai desa pesisir yang penduduknya digolongkan kurang mampu.<sup>5</sup>

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh bentuk kelola yang salah di negara ini. Berpuluh-puluh tahun perhatian terhadap kelautan dikatakan minus, akibatnya laut dan ikan yang menjadi kekayaan negeri ini terbengkalai. Ironisnya kekayaan hanya dinikmati oleh beberapa orang dan bangsa lain yang lebih banyak meraup kenikmatan. Kritik tajam dan arah pembangunannya yang berorientasi kedaratan menjadi titik pacu membangun dunia kelautan. Laut yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, *Kita Belum Cinta Laut*, Bahari, Yogyakarta, 2004, h.89

<sup>5</sup> Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Keiskinan dan Perubahan Sumber Daya Perikanan*, Yogyakarta, LKiS, 2002, h.1

selama ini termarginalisasi, hanya dijadikan tempat pembuangan sampah.<sup>6</sup>

Masyarakat di daerah perairan laut yang kenyang dengan kemiskinan, derita keterbelakangan dan kekumuhan lingkungan mendapatkan injeksi untuk kebangkitan dunia baru. Masalah ini menjadi penting karena nelayan kecil (khususnya buruh nelayan) adalah elemen terbawah yang senantiasa menderita dan menjadi korban dari keserakahan "Bandar besar". Kegiatan di sektor perikanan tangkap ikan melibatkan banyak pihak, khususnya:<sup>7</sup>

1. Pemilik perahu bagan dan peralatan tangkapnya
2. Buruh nelayan

Potensi sumber daya kelautan yang mengandung rahasia dan karunia-Nya itu, seringkali menyebabkan munculnya suatu aktivitas atau usaha di bidang perikanan. Apalagi banyak penduduk yang menggantungkan kehidupan mereka yakni pada laut sebagai nelayan karena laut mengandung potensi usaha untuk dapat menghidupkan keluarga, seperti adanya potensi perikanan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Jaatsiyah ayat 12 yaitu:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

(QS. Al-Jaatsiyah:12) ﴿تَشْكُرُونَ﴾

*Artinya: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari*

<sup>6</sup> Ibid., h.3

<sup>7</sup> Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta, LkiS, 2003, h.27

*karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.*<sup>8</sup>

Ayat di atas pada prinsipnya menggambarkan kepada para penduduk bumi bahwa Allah SWT. Menciptakan laut agar umat manusia dapat menggali potensi laut, mencari karunia atau rizki yang Allah hamparkan di tengah laut dengan maksud agar manusia bersyukur atas karunia-Nya.

Menurut hasil penelitian, sebagaimana dikutip Deasy Yunawati, di kecamatan tanjung balai provinsi sumatera utara tentang pendapatan dari sistem pembagian hasil nelayan bermotor 5 GT dan 5-9 GT. “menunjukkan bahwa distribusi dari pendapatan yang dibagi hasil itu sangatlah timpang diterima antara pemilik bagan dan buruh. Di beberapa daerah menunjukkan pemilik bagan selain mendapat setengah atau separuh penghasilan juga memperoleh 15% dari jumlah hasil sebagai cadangan untuk memperbaiki bagan atau alat tangkap. Dengan demikian, pemilik bagan menerima rata-rata 65% dari penghasilan sedangkan buruh 35%.”<sup>9</sup> Ini jelas tidak adil dan tidak sejalan dengan prinsip dan sistem bagi hasil itu sendiri”.

Pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh individu atau masyarakat dari aktivitasnya. Dalam hal ini individu atau masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila memiliki pendapatan sesuai kebutuhan. Lain halnya pada saat pendapatan tidak sesuai dengan harapan maka kebutuhan hidup dalam

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010, h.25

<sup>9</sup> Deasy Yulinawati, Analisis Pendapatan Dari Sistem Pembagian Hasil Nelayan Bermotor 5 GT dan 5-9 GT di Kecamatan Tanjung Balai propinsi Sumatera Utara, *Hasil Penelitian*, USU, 2008, h. 5



keluarga belum dapat terpenuhi seperti: kebutuhan untuk sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu belum dapat dikatakan sejahtera.

Sedangkan sejahtera menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagaa kerjaan, Bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 31 ketenagaa kerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah: “Suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik dalam ataupun luar hubungan kerja yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang amanah dan sehat.”<sup>10</sup>

Hal ini menjadi landasan dan dasar bagi para buruh nelayan untuk terus bekerja dengan memanfaatkan potensi laut yang ada. Konsep kesejahteraan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep kesejahteraan. Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, maka kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu upaya yang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Bab1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 31

dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian itu, kesejahteraan merupakan langkah untuk membentuk individu dan masyarakat agar berdaya dan mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian ekonomi yang semula lemah menjadi kuat. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya penghasilan dan terpecahkannya masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang dimiliki seseorang.

Kecamatan Kotaagung termasuk sentra perikanan terbesar di wilayah Kabupaten Tanggamus. Hal ini diperlihatkan dengan adanya jumlah nelayan dan pemilik bagan yang cukup banyak dan didukung oleh wilayah pantai tempat berlabuh juga sangat potensial dan luas disertai dengan adanya gudang pelelangan ikan yang banyak dikunjungi tidak hanya oleh masyarakat kecamatan Kotaagung, tetapi juga dari Gisting, Talang Padang dan Kecamatan Wonosobo.

Kehidupan nelayan sangat rentan terhadap pengaruh alam dan tekanan ekonomi dari pihak luar. Ketergantungan ini dipicu saat pergantian musim, cuaca, alam dan arus laut, sekaligus mengenai hasil tangkapan yang diperoleh dan harga jual ikan. Ketergantungan inilah yang menjadikan pendapatan nelayan tak menentu, bahkan terkadang meleset dari prediksi keuntungan yang diperoleh. Namun bagi nelayan yang semacam ini maka tidak ada pilihan lain

---

<sup>11</sup>Amalia, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Integrasi*, LKiS, Yogyakarta, 2001, h. 4

kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya yaitu menjadi buruh untuk mencukupi kesejahteraan keluarga.

Keberadaan laut sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ikan sebagai mata pencaharian utama nelayan. Oleh karena itu tidak heran jika diwilayah ini bermunculan para juragan bagan atau yang sering disebut sebagai pemilik modal, karena hal ini dapat menambah penghasilan para pemilik bagan dan sekaligus membuka peluang kerja bagi nelayan.

Umumnya para buruh nelayan yang bekerja pada pemilik bagan ini mereka ingin tetap memiliki penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketergantungan kepada para pemilik bagan ini yang menyebabkan para buruh seringkali tidak terpikir untuk memiliki alat tangkap sendiri dan terus bekerja sebagai buruh.

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kotaagung khususnya antara pemilik bagan dan buruh, merupakan salah satu bentuk usaha demi meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan dipicu oleh keinginan untuk hidup layak dan hidup lebih maju dari sebelumnya. Membaiknya perekonomian mereka dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, pendapatan mulai meningkat dan pendidikan pun mulai terkancah. Selain itu juga dapat dilihat dari segi sandang, pangan dan papan mereka yang lebih baik dari kondisi kehidupan yang sebelumnya.

Kerjasama yang dilakukan antar kedua belah pihak tersebut diikat oleh kesepakatan atau perjanjian yang biasanya dinamakan perjanjian bagi hasil antara pemilik bagan dengan buruh. Sistem bagi hasil adalah alternatif baik bagi pemilik bagan maupun bagi buruh untuk mengurangi risiko. Pemilik bagan tidak dikenakan kewajiban menggaji buruh tetapi ia menyediakan bagan atau alat tangkap lainnya dan buruh tidak mengeluarkan biaya untuk membeli bagan tetapi hanya mengoperasikan alat pemilik bagan.

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan nelayan dewasa ini adalah menggunakan ketentuan-ketentuan adat setempat yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan dua bagian yakni: satu (1) bagian untuk pemilik perahu bagan, satu (1) bagian untuk buruh bagan, bagian buruh bagan ini dibagi lagi sesuai dengan jumlah buruh dan spesifikasi kerja mereka di perahu bagan tersebut. Bagi hasil yang diterima buruh nelayan itu berupa uang.

Dengan sistem bagi hasil yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh buruh nelayan tidaklah besar ditambah lagi dengan kerusakan mesin, peralatan atau bagian perahu bagan yang lain karena biasanya pemilik perahu bagan membebankan biaya perbaikan tersebut pada hasil uang yang diambil dua bagian.<sup>12</sup>

Ketentuan ini semakin memperkecil nilai bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh buruh nelayan. Secara umum nelayan kurang puas dengan sistem bagi hasil yang ada, namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Jika perahu bagan

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Bapak Ison (buruh nelayan) pada tanggal 09 Oktober 2016



tidak beroperasi maka tidak memperoleh hasil tangkapan maka buruh nelayan juga tidak mendapatkan kompensasi upah dari pemilik perahu bagan kecuali penambahan pinjaman ikatan dan lain sebagainya.

Ancaman ketidak teraturan pendapatan yang diterima oleh para buruh nelayan sangat besar, berbeda dengan pekerjaan yang lain. Kegiatan penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang pendapatannya tidak teratur. Kehidupan keluarga nelayan tergantung pada perolehan dan hasil penangkapan ikan. Semakin banyak ikan yang dihasilkan maka akan menambah penghasilan keluarga, begitu juga perolehan ikan sedikit maka akan mengurangi penghasilan keluarga. Walaupun hasil tidak terlalubesar, namun hal ini merupakan harapan umum buruh nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah telah mensyariatkan manusia untuk bekerja baik secara perorangan ataupun dengan bekerja kepada orang lain. Dorongan agar manusia mencari karunia Allah (bekerja) di muka bumi telah banyak disebutkan dalam Al-qur'an, salah satunya sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ (QS.Jumuah:10)

*Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>13</sup>

Maksud ayat diatas adalah bahwasanya barang siapa yang mencari karunia di jalan Allah dengan sebanyak-banyaknya maka ia akan beruntung. Dan tidak lupa berdo'a dan berusaha agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang terkait dengan sistem bagi hasil dengan judul **"SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BAGAN DAN BURUH NELAYAN DALAM UPAYA MENCUKUPI EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS)"**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus?
2. Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ekonomi Islam?

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010, h.65

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung .
2. Ingin mengetahui sistem bagi hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat teoritis**

Agar dapat tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi Islam.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi penulis, Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan penerapan sistem bagi hasil yang adil untuk disinkronkan dengan pengetahuan teoritis dari bangku kuliah.
- b. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, bahan informasi dan kajian ilmiah bagi penelitian mengenai sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan buruh.
- c. Bagi para pelaku, sepakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukannya bagi para buruh sehingga mereka mengetahui ketidakadilan sistem bagi hasil yang selama ini dijalankan.

- d. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang perikanan laut dan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi para buruh nelayan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, adapun alasan pemilihan lokasinya tersebut terletak di wilayah pantai sebagai pangkalan pendaratan ikan oleh para nelayan. Di samping itu keberadaan pemilik bagan cukup berdekatan dengan buruh nelayan, yaitu berada di satu lokasi.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut *Lexy J. Moleong* dalam penelitian kualitatif, peneliti atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data. Hal ini dikarenakan, orang bisa sebagai instrumen yang sangat luwes dapat menilai keadaan dan mengambil keputusan. Selain itu hanya manusia sajalah yang



dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya dan hanya manusia yang mampu memahami kaitannya dengan kenyataan dilapangan.<sup>14</sup> Penggunaan metode kualitatif dikarenakan berfungsi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>15</sup>

Dalam penelitian kualitatif pendeskripsian dilakukan secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studinya.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai macam literatur diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, h. 5

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 6

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer selalu dianggap lebih baik dari pada data sekunder.<sup>16</sup> Dalam hal ini, data primer yang dimaksud yaitu diperoleh dari data observasi dan data bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung serta penghasilan buruh nelayan yang diperoleh setelah dibagi hasil.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.<sup>17</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profil nelayan Kecamatan Kotaagung, profil pemilik bagan atau juragan, gambaran lokasi penangkapan ikan, potensi perikanan di kecamatan Kotaagung serta demografi penduduk kecamatan Kotaagung.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.<sup>18</sup>

Berdasarkan bentuk penelitian kualitatif dari jenis sumber data yang

---

<sup>16</sup> Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2008, h.70

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.71

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet ke 14, Alfabeta, Bandung, 2009, h.402

digunakan maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*in-dept interview*)

Merupakan cara yang dipakai untuk menanyakan pendapat informan mengenai suatu keadaan tertentu. Berdasarkan hal-hal tertentu peneliti dapat menanyakan hal yang sangat mendasar dan bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan. Dengan demikian wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “*open-ended*” mengarah pada kedalaman informasi dan tidak dilakukan secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal dalam penggalan informasi.<sup>19</sup> *Interview* mendalam ini dapat dilakukan secara berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti mengenai kejelasan masalah yang dijelajahi.

b. Observasi (pengamatan langsung)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat sistematis.<sup>20</sup> Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah penelitian, dan dapat melihat secara langsung kegiatan nelayan yang dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu, observasi juga dimaksudkan

---

<sup>19</sup> HB.Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002, h. 59

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.83

untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada. Observasi ini dilakukan baik secara formal atau pun informal. Metode ini mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Observasi ini dapat memanfaatkan waktu senggang dan interaksi terhadap lingkungan dan perilaku buruh nelayan. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat yang berperan mengamati secara langsung.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>21</sup> Dokumentasi yang dimaksudkan yakni bertujuan untuk membantu pengumpulan data dari daerah penelitian dengan menggali data sekunder yang didokumentasikan. Dokumen tersebut dapat berupa surat-surat, peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang relevan serta dokumen resmi dari instansi terkait.

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h.83



## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti.<sup>22</sup> Data yang memiliki spesifikasi atau ciri-ciri tertentu. Para peneliti juga harus memulai dengan menspesifikasikan secara hati-hati populasi yang hendak diteliti. Populasi penelitian ini yaitu para pemilik bagan dan para buruh nelayan yang ada di kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Jumlah populasi keseluruhan penelitian ini adalah 127 orang (dengan rincian 25 orang pemilik bagan dan 127 orang buruh). Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1:1**  
**Jumlah Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan Di Kecamatan Kotaagung**

No	Kelurahan	Jumlah Pemilik Bagan	Jumlah Buruh Nelayan
1	Pasar Madang	8	40
2	Baros	12	60
3	Perdasuka	-	-
4	Campang Tiga	-	-
5	Kedamaian	-	-
6	Kelungu	-	-
7	Kuripan	1	5
8	Kusa	-	-
9	Negeri Ratu	2	11
10	Penanggungan	-	-
11	Teratas	-	-
12	Terdana	-	-
13	Kuripan	-	-
14	Kapuran	2	11
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>127</b>

<sup>22</sup> Soeratno, Licolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2008, h.70

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Kotaagung, 2016

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Yang dimaksudkan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil penelitian sampel. Diambil 10-15% atau lebih.<sup>23</sup> Karena tidak semua kelurahan yang ada di Kecamatan Kotaagung bekerja sebagai pemilik bagan dan buruh nelayan, maka sampel penelitian ini berjumlah 127 orang diambil 20%. Maka pembagian sampelnya yaitu  $127 \times 20\%$  dibagi 100=25,4 (digenapkan menjadi 25 orang). Jadi sampel penelitian ini adalah 25 orang buruh nelayan dan 25 pemilik bagan diambil dari populasi yang ada.

6. Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif, yakni berangkat dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang konkret. Kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang umum dan konkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus.<sup>24</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 133-134

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, ANDI, Yogyakarta, 2002, h.42

memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan segala sesuatu secara objektif.<sup>25</sup> Sedangkan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati.<sup>26</sup>

Penelitian dilakukan dengan cara memaparkan informasi yang akurat yang diperoleh penulis dari pemilik bagan dan buruh nelayan yang berada di kecamatan Kotaagung yang berkaitan dengan sistem bagi hasil perspektif ekonomi Islam sehingga, mendapatkan keadaan dan praktik yang berlangsung dalam pembagian hasil tersebut, kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.



---

<sup>25</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 49

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 11

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ekonomi Islam Tentang Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing*, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian laba pada pegawai perusahaan dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagian atau untuk kepentingan bisnis (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mall* dan *mudharib*. Dengan demikian, secara pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharabah*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang dipakai sebelumnya secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama baik antara *shahibulmaal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau



*partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi Islam harus dilakukan di semua lini kegiatan ekonomi yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *mudharabah*. Melalui *qiradh* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>27</sup>

## 1. *Mudharabah*

### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* bersal dari kata *al-dharab* yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharab*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) asing menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta, Cet Pertama, UII Press Yogyakarta, 2012, h. 26-27

Menurut Hanafiyah *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan pihak lain punya jasa mengelola harta tersebut.<sup>28</sup>

Jadi, *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.<sup>29</sup> Sedangkan definisi *mudharabah* secara terminologi menurut beberapa mazhab sebagai berikut:<sup>30</sup>

1) Definisi mazhab Hanafi: *mudharabah* adalah suatu akad atau transaksi(kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu: berdirinya *syrikat* ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang berserikat tersebut. Sebagaimana mereka tidak menyebutkan syarat yang harus di pengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi.

---

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam Edisi Ke-1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.135-136

<sup>29</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam(Analisis Fiqih Dan Keuangan) Edisi Ketiga*, PT.Raja Fgrafindo Persada, Jakarta, 2004, h.204

<sup>30</sup>Muhammad, *Op.Cit.*, h.45

- 2) Definisi mazhab Maliki: Telah disebutkan sebagaimana persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan yaitu dengan bagian jelas yang tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua orang yang berserikat. Namun definisi ini menegaskan kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad kontrak, melainkan ia menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.
- 3) Definisi mazhab Syafi'i : Kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.
- 4) Definisi mazhab Hambali. Menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah kedua orang yang berserikat menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.

Jadi, definisi yang persentif bagi *mudharabah* sebagian jalan tengah kelengkapan definisi dari berbagai mazhab diatas, *mudharabah* adalah suatu akad kontrak yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dengan jumlah, jenis dan katrakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta(*jaiz attas*) kepada oranglain yang *aqil, mumayyiz*, dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk

berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.<sup>31</sup>

## b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Quran maupun sunnah karena *mudharabah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syariah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam.<sup>32</sup> *Mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Dasar hukum akad *mudharabah* adalah sebagaimana firman sebagai berikut:



Artinya: *Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*<sup>33</sup>.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (QS. Al-Jumuah:10)

Artinya: *apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.*<sup>34</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.46

<sup>32</sup> Afzalurrahman "Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1". PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 394

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010, h.34

Maksud ayat diatas ialah diperintakan kepada manusia untuk bertabar ke muka bumi dengan tujuan mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya dengan cara yang di halakan.

Tidak ada indikasi yang jelas dan tegas dalam Al-qur'an maupun Hadis, namun karena *mudharabah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syariah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam.<sup>35</sup> *Mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha perekonomian dengan cara yang benar dan adil sehingga menguntungkan antar kedua belah pihak yang melakukan kerjasama denmgan menggunakan akad mudharabah ini.

### c. Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

Adapaun rukun *mudharabah* adalah.<sup>36</sup>

#### 1) Pelaku

- a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
- c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.23

<sup>35</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Dana Bhakti Wakap, Yogyakarta, h.394

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.49



## 2) Objek *mudharabah* (modal kerja)

- a) Modal
- b) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya(dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya.
- c) Modal harus tunai dan tidak utang.Tanpa adanya setoran modal. Pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- d) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap menjadi pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.

## 3) Kerja

- a) Kontribusi mengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, skill dan lain lain.
- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diinvestasikan oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- d) Pengelola dana harus mengetahui semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- e) Pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima

modal dan sudah bekerja maka pengelola berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

#### 4) Ijab Kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi yang digunakan saling rela /ridha diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi moderan.

#### 5) Nisbah keuntungan

a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh dan mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b) Perubahan nisbah yang harus berdasarkan kesepakatan bersamakedua belah pihak.

c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam yaitu :

- 1) Ada Akad (akad *mudharabah*), dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 2) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 3) Pemilik barang yang menyerahkan harta atau barangnya
- 4) Orang yang bekerja, yaitu pengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 5) Ijab qabul yaitu pernyataan dan ekspresi yang digunakan saling rela/ridha diantara pihak-pihak pelaku akad, yang dilakukan secara verbal, tulis dan memiliki respondensi yang baik.
- 6) Laba (keuntungan/ isbah keuntungan).<sup>37</sup>

Adapun syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri, syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang/tunai, apabila barang tersebut berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
- 3) Modal diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.139

tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan milik pemodal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalkan aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntunga akan dibagi dua dan *kabul* dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Jika didalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak, menurut pendapat As-Syafi'I dan Maliki.<sup>38</sup>

Dalam melakukan suatu kerjasama bagi hasi/ *mudharabah* maka hendaknya kedua belah pihak yang menjalani kerjasama tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ada di atas.

---

<sup>38</sup> Mardani., *Op.Cit*, h. 197

#### d. Macam-Macam *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabahmuqayyadah* yaitu:

- 1) *Mudharabahmutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari akad *mudharabah mutlaqah* dimana didalam kerjasamanya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul maal* dalam memsuki jenis usaha.

#### e. Biaya Operasional *Mudharabah*

Biaya operasional *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan sendiri, demikian juga apabila mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Apabila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik modal tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja modal tersebut sama besar bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola modal untuk membelanjakan modal *mudharabah* guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah* tersebut.



Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudhrabah* pada dasarnya dibebankan kepada pemilik modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut imam malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga kemungkinan memperoleh keuntungan berikutnya.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Imam Hambali adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) *Shahibul maal* mengeluarkan 100% kebutuhan suatu proyek kerjasama, sedangkan *mudharib* hanya sebagai pengelola usaha.
- 2) Jangka waktu usaha di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama .
- 3) Jumlah pembiayaan harus dinyatakan secara tunai.
- 4) *Shahibul maal* menanggung segala kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika kerugian usaha tersebut terjadi atas kelalaian pengelola.
- 5) Biaya operasional di bebaskan kepada *mudharib*.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.142

<sup>40</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Iandonesia*, Edisi ke-3, Salemba 4, Jakarta, 2014, h.128

#### f. Berakhirnya Mudharabah

Menurut para fiqih menyatakan bahwa suatu akad *mudharabah* menjadi batal dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Masing-masing pihak menyatakan akad batal. dalam perjanjian kerjasama sistem bagi hasil akad *mudharabah* ini dikatakan batal ataupun berakhir ketika pekerja bertindak hukum terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal, ataupun pemilik modal menarik kembali modalnya.
- 2) Salah seorang yang berakad telah kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila ataupun lupa ingatan.
- 3) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanajemen oleh pekerja atau pengelola modal. Demikina juga halnya, akad *mudharabah* batal apabila modal dibelanjakan oleh pengelola modal sehingganya modal tersebut tidak ada yang tersisa.
- 4) Akad dikatakan batal apabila pemilik modal ataupun pengelola meninggal dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi fasakh. Apabila *mudharabah* menjadi fasakh maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal *mudharabah* lagi. Jika pengelola modal masih menggunakan modal tersebut, tetapi mengetahui pemilik modal sudah meninggal dunia dan memakai

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, h.180

modal itu tanpa seizin ahli warisnya, maka perbuatan tersebut ghasab (memakai barang tanpa izin). Pengelola modal wajib mengembalikan (menjaminnya, kemudian jika modal itu menguntungkan maka keuntungannya dibagi dua).

Jika *mudharabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk barang dagangan, pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena itu adalah hak kedua belah pihak. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila pengelola modal setuju dengan penjualan sedangkan pihak pemilik modal (modal) tidak mau menjual, maka pemilik modal dipaksa menjual karena pengelola modal mempunyai hak dalam keuntungan dan keuntungan tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara menjualnya.<sup>42</sup>

## 2. *Syirkah*

Konsep *syirkah* dikembangkan dalam Islam kedalam bentuk-bentuk kerjasama dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan berdasarkan pada prinsip bagi hasil.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.143

<sup>43</sup> Muhammad, *Op.Cit.*, h.36

### a. Pengertian *Syirkah*

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilat* yang artinya campur atau pencampuran. Demikian yang dinyatakan *taqiyyuddin*. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta oranglain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud *syirkah* ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta dan keuntungan.
- 2) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib yang dimaksudkan dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada suatu untuk kedua orang atau lebih dengan cara yang mahsyur(diketahui).
- 3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berkaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu udaha dan membagi keuntungannya.

Setelah diketahui definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

---

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*,h.125

<sup>45</sup>*Ibid.*, h.126

Sedangkan dalam fiqih Islam banyak dijelaskan mengenai *syirkah* orang yang bersekutu dalam suatu urusan tertentu, tidak dalam semua harta, seperti bersekutu membeli suatu barang itu diperbolehkan.<sup>46</sup> Namun ketentuan tersebut terbatas pada kebolehan adanya akad bagi hasil dan halal mengambil bagian keuntungan, asal tidak dilakukan untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat.

#### b. Dasar Hukum *Syirkah*

Terkait pengertian *syirkah* yang dijelaskan diatas bahwa *syirkah* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dan sama-sama dalam menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun dasar hukum akad *syirkah* dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:<sup>47</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ (Q.S.shad:24).

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat

<sup>46</sup> Abdul Fatah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1994, h.154

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Terjemah per kata*, Lajnah

Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depag RI, Jakarta, 2007, h.536

*sedikitlah mereka ini". dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*<sup>48</sup>

Maksud ayat ini adalah bahwa tidak setiap yang berserikat/berkerjasama saling menguntungkan, bahkan sering terjadinya mereka berbuat zalim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.

QS.al-Ma'idah:1) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.<sup>49</sup>

Berdasarkan keterangan Al-qur'an tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fiqh sepakat menetapkan bahwa hukum syirkah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah tersebut.<sup>50</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Syirkah

Dalam syirkah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar syirkah menjadi sah, syarat tersebut terbagi dalam dua golongan yaitu:

- 1) Syarat bagi pihak yang mengadakan perjanjian yaitu harus berakal sehat dan baligh.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Terjemah per kata*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depag RI, Jakarta, 2007, h.585

<sup>49</sup> I Departemen Agama RI, *Ibid*, h.295

<sup>50</sup> Sri Nurhayati, *Ibid*, h.155



2) Syarat bagi barang atau modal yang disetorkan dalam *syirkah* hendaklah: barang yang dapat dihargai atau dinilai dengan uang. Dan modal yang diserahkan oleh masing-masing anggota dijadikan satu menjadi harta *syirkah* dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usul modal tersebut.<sup>51</sup>

#### **d. Macam-Macam *Syirkah***

Adapun macam-macam *syirkah* adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

##### *1) Syirkah Al-Inan*

*Syirkah al-inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.

##### *2) Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah Mufawadhah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.

---

<sup>51</sup>Chairun Pasaribu "Hukum Perjanjian Dalam Islam" Jakarta, Sinar Grafika, 1994, h.73-76

<sup>52</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h.92

### 3) *Syirkaha'maal*

*Syirkah a'maal* adalah kontrak kerjasama antara dua orang n atas lebih dalam satu profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

### 4) *Syirkah wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

### e. Biaya Operasional

Biaya operasional kerjasama *syirkah* diambil dari hartanya masing-masing antara kedua belah pihak. Kiranya dapat diapahami bahwa biaya pengelolaan *syirkah* pada dasarnya dibebankan kepada pemilik kedua belah pihak yang melakukan akad, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik kedua belah pihak mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut imam malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga kemungkinan memperoleh keuntungan berikutnya.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i mengenai biaya pengelolaan/operasional *syirkah* adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Pelaku akad kerjasama, sama-sama mengeluarkan modalnya untuk kebutuhan suatu proyek kerjasama,
- 2) Jangka waktu usaha di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama .

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.142

<sup>54</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Iandonesia*, Edisi ke-3, Salemba 4, Jakarta, 2014, h.139

- 3) Jumlah pembiayaan harus dinyatakan secara tunai.
- 4) Kerugian di tanggung bersama oleh pelaku akad.
- 5) Biaya operasional di bebaskan kepada *kedua belah pihak*.

#### 6) Berakhirnya *Syirkah*

*Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:<sup>55</sup>

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk melaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini mewujudkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bekerjasama, baik karena gila maupun karena aasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanya meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian harus dibagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Modal *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

---

<sup>55</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.133

## B.Ekonomi Keluarga

### 1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Secara etimologi ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *aikos* berarti rumah dan *nomos* berarti aturan. Jadi, pengertian ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup di dalam rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara.<sup>56</sup>

Ekonomi juga didefinisikan dengan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya dalam rangka memenuhi kebutuhan, pengalokasian sumberdaya tersebut sangat tergantung pada nilai yang mengatur perilakunya. Ketentuan nilai mengenai benar atau salah, baik dan buruk. Akan tetapi dasar penilaian nilai tersebut dibuat untuk mengatur perilaku manusia yang bervariasi antara individu dengan masyarakatnya.<sup>57</sup>

Ekonomi merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat dinamis antar sektor kelautan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu mengenai gagal atau suksesnya kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

<sup>56</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, h.30

<sup>57</sup>Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Ekonosia, Yogyakarta, 2004, h..34

Ekonomi keluarga juga dapat diartikan sebagai kumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang dapat membantu perekonomian keluarga (rumah tangga). Norma-norma tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota rumah tangga perekonomian ini bertujuan menciptakan kehidupan sejahtera di dunia keberuntungan mendapatkan ridho Allah SWT di akhirat.<sup>58</sup>

Ekonomi keluarga juga dapat diartikan sebagai kegiatan dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.<sup>59</sup> Dari realitas itulah dapat dipahami bahwa betapa pentingnya syariat Islam yang memberikan pedoman, tuntunan dan menunjukkan jalan hidup dan kehidupan ke arah kemaslahatan, terhidar dari kemelaratan. Adapun yang dimaksud dengan kemaslahtan adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan yang berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang manusia.<sup>60</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat di pahami bahwa peningkatan ekonomi keluarga adalah sebuah upaya yang membuat

---

<sup>58</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Buku Andalan, jakarta, 1998 ,h.48

<sup>59</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2003, h.69

<sup>60</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Sosial Lingkungan Asuransi Sehingga Ukhuwah*, Bandung, Mizan, Juni, 1994, h.148

komunitas lokal atau keluarga memiliki inisiatif dan kemampuan mengelola sumberdaya ekonomi yang ada kemudian mewujudkannya dalam kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

## 2. Landasan Pengembangan Ekonomi Keluarga

Kegiatan ekonomi pada dasarnya memiliki dasar-dasar hukum, yaitu al-Qur'an dan Hadis, yang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap praktek ekonomi dan lebih banyak berkaitan dengan norma-norma. Penafsiran ekonomi yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis bahwa ekonomi Islam banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan unsur lain yang berhubungan dengan masyarakat, serta lebih menekankan bagaimana mengkondisikan kehidupan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggal dan memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.<sup>61</sup>

Manusia diturunkan dimuka bumi ini dibekali dengan sumber penghidupan, akan tetapi terkadang manusia lalai dan tidak mau mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan Allah SWT. Maka dari itu sebagai manusia

---

<sup>61</sup>Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.3



kita wajib bersyukur ,dan selalau menaati perintah-nya dan menjauhi larangan-Nya.Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S.Ibrohim:7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾  
(QS.Ibrahim:7)

*Artinya: dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".<sup>62</sup>*

Berdasarkan ayat diatas maka sebagai makhluk Allah SWT, harus bersyukur dengan apapun yang sudah diterimanya,bahkan Allah SWT akan menambahkan nikmatnya, begitu pula sebaliknya apabila manusia itu tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah SWT,akan menambah cobaan yang amat pedih bagi manusia tersebut.

### 3. Standar Kecukupan Ekonomi Keluarga

Adanya permasalahan dalam rumah tangga tidak dapat dihindari bahwa ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan, karena ekonomi merupakan tonggak tegaknya sebuah keluarga,walaupun ekonomi bukanlah segala-galanya, akan tetapi apabila tidak ada faktor pendukung tentang ekonomi atau keuangan maka timbullah suatu masalah, Dengan demikian sangatlah penting ekonomi bagi kelangsungan hidup seseorang.

---

<sup>62</sup>Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,Diponegoro,Bandung, 2010,h.78

Sebagaimana dikutip Ricard G.Lipsey bahwa Yusuf Qardwi mengemukakan tentang standar kehidupan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi keluargayaitu:

- a. Cukup makan yang memenuhi standar nilai gizi.
- b. air untuk memasak, makan, pengairan,memebersihkan badan, bersuci dan sebagainya.
- c. Cukup sandang yaitu terjadinya pakaian atau peneutup aurat, menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin,serta agar bisa tampil lebih banyak, termasuk perlu memiliki pakaian yang bagus untuk menghadiri peristiwa tertentu,serta pakaian untuk sholat jumat dan sholata har raya.
- d. Cukup papan, yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak huni luas dan lahan terhindar dari kondisi alam, serta merdeka yaitu penghuni rumah tidak terlihat dari orang lewat.
- e. Cukup uang untuk keperluan hidup rumah tangga.
- f. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapan.
- g. Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit.
- h. Cukup uang untuk tabungan haji dan rumah.<sup>63</sup>

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa dalam konsep Yusuf Qordawi bahwa standar kecukupan, kesejahteraan dan kemandirian keluarga ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti sandang,

---

<sup>63</sup>Richard G.Lipsey dkk, *Ilmu Ekonomi*, Bina Aksara, Jakarta,1996,h.103

pangan, papan dan kebutuhan untuk pendidikan dan dilarannng untuk berlebihlebian dalam pemenuhan kebutuhan.

#### **4. Langkah-Langkah Mensejahterakan Ekonomi Keluarga**

Problematika kehidupan yang dihadapi umat Islam di Indonesia memang tidak sedikit, satu diantara problematika umat Islam tersebut trletak pada bidang ekonomi. Secara sederhana dan nampak pada kita adalah tingkat penghasilan riil yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan dalam mengelola serta kurangnya pemerataan kemakmuran dalam hidup yang semuanya terkemas rapi dalam bingkai kemiskinan.

Wajah kemiskinan ini sudah barang tentu bukan merupakan kondisi ideal yang harus di pertahankan berlama-lama, manusia akan mudah terjerumus ke dalam dunia kekafiran mana kala ia tidak dapat menjadi orang kaya, oleh sebab itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seseorang harus melakukan kreatifitas dan aktivitas dalam mengembangkan perekonomiannya.

Masalah kemiskinan di kalangan nelayan di pedesaan memang kompleks dan rumit, tetapi permasalahan nelayan miskin di pedesaan masih tetap dapat kita kelompokkan. Ekonomi mereka jelek, kesehatannya kadang-kadang buruk, pendidikan rendah, keterampilan kurang, sosial dan budaya mereka kacau dan sebagainya.

Setelah menentukan satu permasalahan melalui skala prioritas tugas selanjutnya yaitu bagaimana skala prioritas yang dianggap lebih mendesak dan penting untuk segera dicari jalan keluar penyelesaiannya. Peningkatan ekonomi merupakan salah satu skala prioritas yang harus segera ditangani. Dalam ilmu pengembangan masyarakat salah satu pendekatan dalam pengembangan masyarakat adalah pendekatan ekonomi.

Pendekatan ekonomi adalah upaya peningkatan kesejahteraan warga, keluarga masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan etos kerja, memberikan wawasan bisnis, wawasan tentang nelayan, membangun jaringan bisnis, pembekalan, dan lain-lain.

Menurut sumitro maksum, melakukan pembangunan bagi masyarakat perlu memperhatikan kondisi dan karakter yang nyatanya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dalam hal ini cara penanganan pembangunan di desa memerlukan keseragaman dalam menggunakan jenis instrumen dan pendekatan yang sifatnya berbeda-beda pula.<sup>64</sup>

Dalam membangun perekonomian sudah secara pasti harus melakukan keunggulan kognitif, keunggulan kompetitif dapat berjalan jika didukung oleh piranti-piranti yang diantara piranti itu adalah pendidikan kewirausahaan.

---

<sup>64</sup> Sumitro maksum, *penyuluhan masyarakat di negara sedang berkembang, Cet Ke III*, Jakarta, Pustaka Pengembangan Nusantara, 1994, h.81

Maka untuk mengeliminasi dampak dari ketimpangan struktur perekonomian nasional dan untuk memberdayakan ekonomi keluarga, maka langkah berikut perlu dipertimbangkan sebagai strategi yaitu:

- a. Peningkatan akses kepada aset produktif
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha antara industri kecil dan menengah atau besar.
- c. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri kecil.
- d. Kebijakan tenaga kerja yang merangsang tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru yang berkecambah menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
- e. Adanya perangkat perundangan yang benar melindungi dan mendukung pengembangan industri kecil yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil.<sup>65</sup>

Peningkatan akses pada aset produktif merupakan langkah utama dalam rangka mengeliminasi dampak ketimpangan perekonomian nasional dan untuk memberdayakan ekonomi industri kecil terutama memperbesar perannya dalam struktur perekonomian nasional. Masalah yang mendasar dalam rangka perluasan iklim usaha dan memberdayakan industri kecil ini adalah akses kepada dana. Akses kepada modal harus diartikan sebagai

---

<sup>65</sup> Adi susono, *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi Pendidikan Dan Dakwah)* Jakrata, Gema Insani Pers, 1998, h. 25

keterjangkauan yang memiliki dua sisi, ada pada saat keperluan dan kemampuan untuk memanfaatkannya dengan demikian persyaratan teknik perbankan seperti yang biasanya digunakan di sektor modern tidak dapat diterapkan disini, paling tidak pada tahap awal, misalnya penilaian pemberian kredit tidak harus berdasarkan agunan tetapi berdasarkan prospek kegiatan usaha, dan bunganya harus memperhatikan industri kecil yang senyatanya dan jelas menguntungkan bagi usaha ekonomi rakyat.

## 5. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi keluarga, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) sejak tahun 1994 memperkenalkan kategorisasi baku yang didasarkan pada kondisi fisik maupun nonfisik dari suatu entitas keluarga. Ada 5 kategori keluarga sejahtera (KS) menurut BKKBN, yaitu KS tahap pra sejahtera KS tahap I, KS tahap II dan KS tahap III plus. Pengkategorian tersebut didasarkan pada indikator-indikator yang disusun secara hierarkis. Hierarki kategori kesejahteraan keluarga tersebut merupakan terjemahan dari tahapan pembentukan keluarga sejahtera.<sup>66</sup>

Adapun indikator-indikator untuk mengukur taraf keluarga sejahtera dengan menggunakan acuan BKKBN adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>Syalabi, *Kesejahteraan dan Indikator Kesejahteraan*, tersedia di <http://Syalabi.net.com>, h.3-4, yang diakses pada 27 juli 2016.



a. Keluarga Sejahtera Tahap II

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
- 2) Paling kurang seminggu sekali keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian setahun terakhir.
- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah.
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.
- 6) Paling kurang 1 anggota keluarga berusia 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- 7) Seluruh anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
- 8) Seluruh anak usia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- 9) Apabila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih berstatus pasangan usia subur memakai kontrasepsi(kecuali bila hamil).

b. Keluarga Sejahtera Tahap III

- 1) Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian pendapatan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.

- 3) Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk komunikasi antar anggota keluarga.
- 4) Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang satu kali dalam 6 bulan.
- 6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar atau radio atau televisi atau majalah.
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

c. Keluarga Sejahtera III Plus

- 1) Keluarga atau anggota keluarga teratur (pada saat tertentu) dan sukarela dalam memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan atau yayasan atau institusi masyarakat.<sup>67</sup>

Adapaun keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera 1 termasuk dalam kategori keluarga tertinggal atau miskin. Karena keluarga pra sejahtera dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara

---

<sup>67</sup>Biro Pelaporan dan Statistik, Petunjuk Teknis Pendidikan Keluarga Sejahtera, BKKBN, Jakarta, 1997, h.29

minimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan keluarga sejahtera 1 adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sangat mendasar, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

Berdasarkan konsep kesejahteraan sosial diatas dapat dipahami bahwa dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial yang meliputi kesejahteraan lahir dan batin, perlu diwujudkan keselamatan, kesusilaan serta ketentraman lahir dan batin, sehingga masyarakatnya dapat berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya sendiri.



## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Kotaagung**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Kotaagung**

Kota Agung terletak di kaki Gunung Tanggamus dan di sisi pantai Teluk Semaka yang merupakan kecamatan pertama dan tertua dalam jajaran pemerintahan di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, pada saat Kabupaten Tanggamus memisahkan diri dari Kabupaten Lampung Selatan. Kotaagung merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Pada saat pemerintahan Hindia Belanda, Kotaagung dipimpin oleh Controllor ia menganggap bahwa Kotaagunga akan menjadi cikal bakal ibu kota Kabupaten Tanggamus yang sudah berkembang sebagai wilayah pemerintahan kecil.

Semangat otonomi daerah yang digulirkan bersamaan dengan tumbangnya orde baru yang ditandai dengan adanya reformasi juga berpengaruh di wilayah Kotaagung dan sekitarnya. Keinginan masyarakat setempat untuk mandiri ditandai dengan perjuangan untuk menjadikan daerahnya sebagai Kecamatan definitif.

Setelah melalui proses yang panjang, harapan ini pun terwujud, Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1997 yang di undang-undangkan pada tanggal 03 januari 1997 bahwasannya Pada tanggal 21 Maret 1997

Kotaagung diresmikan berdiri menjadi sebuah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

Kotaagung merupakan bukti nyata bahwa kecamatan ini merupakan kota pelabuhan terbesar di wilayah Tanggamus atau di sekitar Teluk Semaka. Oleh karena itu, ketika beberapa kecamatan Kotaagung memisahkan diri, nama pusat diberikan kepada Kotaagung yang berada tepat di tengah-tengah kecamatan yang lain, seperti Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Kotaagung Timur, Kecamatan Kotaagung Tengah dan Kecamatan Kotaagung Tenggara.

Dalam struktur pemerintahan Kecamatan Kotaagung yang semula terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, mengalami perubahan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor.2 tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah kabupaten Tanggamus menjadi tiga kelurahan, yaitu: Kelurahan Baros, Kelurahan Pasar Madang dan Kelurahan Kuripan. Kecamatan Kotaagung juga memiliki 10 desa atau pekon, yakni: Pekon kedamaian, Pekon Kotaagung, Pekon Kusa, Pekon Neger Ratu, Pekon Penanggungan, Pekon Pardasuka, Pekon Teratas, Pekon Terbaya dan Pekon Terdana.

## 1. Keadaan Geografis Kecamatan Kotaagung

Secara Administrasi Kecamatan Kotaagung, dengan jumlah penduduk keseluruhan 4.192 jiwa. Adapun batas wilayah Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Tanggamus.
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gisting.
- d. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Semaka.

Hampan wilayah Kecamatan Kotaagung terletak pada posisi  $104^{\circ}18'$  -  $105^{\circ}12'$  Timur dan  $5^{\circ}05'$  -  $5^{\circ}56'$  Lintang Selatan, dengan kondisi geografis sebagai berikut:

- 1) Ketinggian dari permukaan laut 34-132 m.
- 2) Banyaknya curah hujan 12,19 mm.
- 3) Banyaknya curah hujan terbanyak bulan september s/d Januari.
- 4) Suhu udara rata-rata 30 C.
- 5) Jarak ke pusat pemerintahan ibukota Kabupaten Tanggamus kurang lebih 10 km dan jarak ke pusat Pemerintahan Provinsi Lampung sekitar 65 km.
- 6) Ketersediaan angkutan umum pada pukul 06.00-18.00 WIB/setiap hari.



## 2. Keadaan Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Kotaagung

Pendidikan merupakan suatu bimbingan untuk membantu memberikan pengatutan yang luas dengan tujuan untuk membangun potensi anak agar anak tersebut cakap dalam mencapai cita cita dan tidak terantung pada oranglain. Adapun Pendidikan tersebut dapat diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal.

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**  
**Di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus**  
**Tahun 2016**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase %
1	Buta hurup	-	-
2	Tidak tamat SD	3.58	8,54
3	Lulus SD	2.550	60,83
4	Lulus SMP	4.88	11,64
5	Lulus SMU	4.80	11,45
7	D1-D2-D3	2.02	4,81
8	S1	1.12	2,67
9	S2	2	0,04
10	S3	-	-
	-	<b>4.192</b>	<b>100</b>

Sumber: *Monografi* Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 29 September tahun 2016.<sup>68</sup>

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Kotaagung berlatar belakang lulusan SD, hal ini membuat pengetahuan masyarakat tentang kesadaran pendidikan menjadi sangat terbatas

---

<sup>68</sup> Monografi, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 29 September tahun 2016

sehingga total masyarakat yang berpendidikan S1,S2, S3 hanya 114 orang.

### 3. Keadaan Ekonomi Kecamatan Kota Agung

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku, aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi terhadap barang dan jasa. Secara umum ekonomi adalah ilmu tentang pengurusan sumber daya materi individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Kondisi perekonomian atau mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sebagian besar adalah wiraswasta yang sebagian besar hanya berpendidikan lulusan SD, SLTP, dan SLTA, sedangkan mata pencaharian sebagai PNS sebagian besar lulusan dari Akademi atau Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat**  
**Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus**  
**Tahun 2016**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Presentase(%)
1	Swasta	4.71	11,23
2	Petani	4.25	10,13
3	PNS	2.25	5,36
4	Bidan	2.04	4,86
5	TNI/POLRI	2.65	6,32
7	Pedagang	4.28	10,13
8	Nelayan	1.27	3,02
9	Peternak	1.34	3,19
10	Lain-lain	1.913	45,63
	-	<b>4.192</b>	<b>100</b>

Sumber: *Monografi Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus*, dicatat tanggal 29 September tahun 2016.<sup>69</sup>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian besar memiliki mata pencaharian wiraswasta, petani, pedagang dan lain nya. Jenis usaha ini secara tidak langsung akan berpengaruh tingkat perekonomian masyarakat. Masyarakat yang sangat tergantung pada keadaan cuaca yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat perkembangan penduduk.

#### **4. Keadaan Kemiskinan di Kecamatan Kota Agung**

Kemiskinan merupakan ketidak berdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan. Kemiskinan juga dapat dilihat dari standar hidup layak masyarakat, artinya dilihat dari apakah suatu keluarga atau masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

---

<sup>69</sup> Monografi ,Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 29 maret tahun 2016

**Tabel 3.3**  
**Tingkat Kemiskinan Masyarakat**  
**Di Kecamatan Kotaagung kabupaten Tanggamus**  
**Tahun 2016**

No	Indikator Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	Jumlah kepala keluarga	2.195	-
2	Keluarga pra sejahtera	1.180	53,75
3	Keluarga sejahtera 1	5.58	25,42
4	Keluarga sejahtera 11	2.28	10,38
5	Keluarga sejahtera 111	1.21	5,51
6	Keluarga sejahtera 111 plus	1.08	4,92
	-	<b>2.195</b>	<b>100</b>

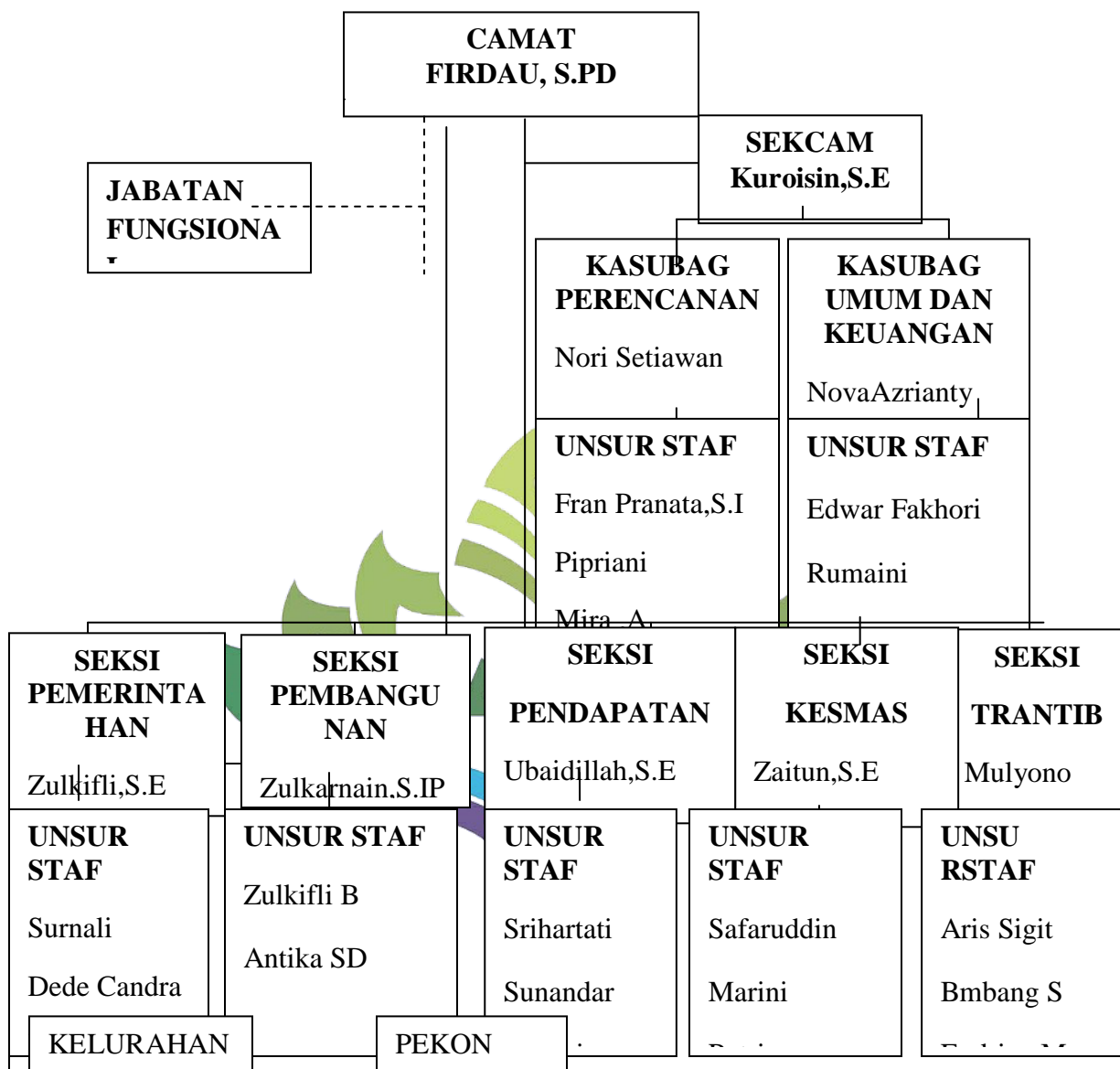
Sumber: *Monografi Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus*, dicatat tanggal 29 September tahun 2016.<sup>70</sup>

Diketahui bahwa mayoritas keluarga di Kecamatan Kotaagung termasuk dalam keluarga pra sejahtera yaitu berjumlah sebanyak 1.180 penduduk diakibatkan masyarakat di Kecamatan ini tidak sedikit bekerja sebagai buruh nelayan.

---

<sup>70</sup> *Monografi Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus*, dicatat tanggal 29 maret tahun 2016

### 5. Struktur Organisasi Kecamatan Kotaagung



Sumber: *Monografi* Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 29 September tahun 2016

## **B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemili Bagan an Buruh Nelayan di Kecamatan Kotaagung**

Pada prinsipnya uang dari hasil penjualan ikan dibagi hasil sesuai tugas dan tanggung jawab pemilik modal dan pekerja (buruh nelayan). Disini pemilik modal mendapatkan keuntungan yang lebih besar atas resiko kehilangan modalnya, sedangkan pekerja mendapatkan bagian lebih kecil dari resiko kehilangan nyawanya.

Dalam hal operasional kerjanya, para nelayan di Kecamatan Kotaagung sangat ditentukan oleh kecanggihan peralatan yang mereka miliki, ada yang berlayar dekat menyusuri pantai dan ada juga yang berlayar jauh ke laut lepas. Pembagian uang dari hasil penjualan ikan dilakukan setelah mendapatkan hasil dari penjualan ikan. Setelah dipotong biaya operasional yaitu solar, oli, ransum/bekal selama melaut dan lain sebagainya. Posisi dan hubungan dalam kerjasama bagi hasil itu dilakukan antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama (pemilik bagan) dan pihak kedua (pekerja buruh nelayan).

Biasanya para buruuh nealyan akan mendapatkan uang lawuhan (uang makan), tetapi tidak semua pemilik bagan memberikan uang lawuhan tersebut kepada buruh nelayan. Berdasarkan hasil wawancara kepada para buruh nelayan di Kecamatan Kotaaagung menyatakan bahwa melaut dilakukan selama 7-8 hari.

Hubungan kerjasama ini dilakukan antara pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung hanya berdasarkan kepercayaan dan rasa tolong menolong saja, oleh karena itu pemilik bagan benar-benar memilih buruh nelayan untuk menjalankan bagan nya. Perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan, tidak ada bukti tertulis apapun, baik bukti secara tertulis maupun saksi-saksi dari pihak luar.<sup>71</sup> Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diantar keduanya, maka di haruskan untuk saling mengenal dengan baik.

Rasa kepercayaan itu juga dibutuhkan oleh pekerja/buruh nelayan terhadap pemilik bagan. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Adi menyatakan bahwa ketika para buruh nelayan tidak mendapatkan hasil dari melautnya akan menyebabkan ia tidak mendapatkan hasil dari kerjanya, namun mereka masih mendapatkan bantuan dari pemilik bagan, bisa berupa pinjaman uang dan akan dipotong dalam pembagian hasil dari penangkapan ikan selanjutnya.

Modal pokok keutuhan buruh nelayan dan anggota dalam melakukan kerjasama adalah keharmonisan bekerja, karena ketidak cocokan ataupun percekcoakan antar sesama anggota akan menyebabkan para buruh nelayan untuk pindah kelain juragan atau mebakatkan kerjasamnya, maka hal inilah

---

<sup>71</sup> Fiman sebagai pengelola atau Buru Nelayan Dalam Kerjasama Anantara Pemilik Bagan dan Buruh Nelayan Di Kecamatan Kotaagung Tanggamus, *Interview* ,Tanggal 07 April 2017



awal dari kebangkrutan bagan tersebut.

Dengan tindakan membangun keharmonisan dan mempererat komunikasi atau hubungan antara pemilik bagan dan buruh nelayan, akan mendapatkan keuntungan bagi pemilik bagan. Para buruh nelayan akan berkata jujur dalam laporan tangkapan ikan nya dan pemilik bagan juga leluasa untuk selalu mengingatkan kepada buruh nelayan untuk tidak berpindah kepada pemilik bagan yang lain.



## BAB IV

### ANALIS DATA

#### **A. Praktik Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan Di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus**

Secara ekonomi, mata pencaharian masyarakat lokal meskipun mulai terdiversifikasi ke sektor-sektor alternatif, tetapi sifatnya temporer dan belum signifikan meningkatkan pendapatan. Akibatnya dari aktivitas ekonomi dari masing-masing desa, hanya terdapat segelintir orang yang memiliki modal yang menikmati hasil kerja, sedangkan sebagian besar warga masyarakat tetap terjebak dalam keiskinan.

Oleh karena rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan dan ketertinggalan informasi dan teknologi menyebabkan masyarakat tidak memiliki posisi tawar menawar dalam politik. Akibatnya mereka cenderung hanya pasrah dan menuruti semua aturan dan keputusan politik yang dibuat oleh pemerintahan tanpa mengetahui persis apa manfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa.

Setiap kehidupan tentu memerlukan suatu strategi nafkah rumah tangga (keluarga), di mana ia merupakan landasan pilihan aktivitas nafkah yang dilakukan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai tujuan rumah tangga (keluarga). Sedangkan aktivitas nafkah adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dapat dilihat sebagai strategi

nafkah. Strategi nafkah ini dapat mengacu pada program dan kebijakan yang dijalankan pada keseluruhan tingkatan masyarakat. Konsep strategi lalu dihubungkan pada pilihan dan kekuasaan serta pola-pola interaksi dalam masyarakat.a

Berdasarkan kerangka tersebut, maka masyarakat di Kecamatan Kotaagung melakukan terobosan baru dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yakni dengan melalui kerjasama sistem bagi hasil. Nelayan adalah salah satu pekerjaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kotaagung. Kerjasama ekonomi bidang nelayan di Kecamatan Kotaagung dapat menguntungkan kedua belah pihak dan layak untuk dijadikan usaha dalam pemenuhan kebutuhan hidup ekonomi keluarga. Masyarakat nelayan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka dengan memanfaatkan sumberdaya alam ( laut).

Pekerjaan sebagai nelayan dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pendapatan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Kotaagung, khususnya dalam upaya mencukupi pendapatan ekonomi keluarga, hal ini disebabkan karena ikan merupakan kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari, baik masyarakat tingkat pedesaan, perkotaan, bahkan seluruh masyarakat di negara ini.

Peningkatan ekonomi keluarga nelayan di Kecamatan Kotaagung dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan menerapkan strategi-strategi dalam mensejahterakan kehidupan keluarga melalui dua sektor, yaitu sektor nelayan

(milik sendiri maupun kerjasama dengan orang lain) dan sektor diluar pekerjaan nelayan yaitu dengan mempertahankan usaha yang sudah berjalan. Dengan menerapkan strategi tersebut, maka dapat memberikan pemenuhan kebutuhan hidup yang menjanjikan dalam keluarga.

Tolak ukur dalam mencukupi perkonomian rumah tangga nelayan di Kecamatan Kotaagung melalui strategi dari nelayan dan pola nafkah ganda dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan hidup para anggota keluarga, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan , kesehatan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, penulis menganalisis bahwa kehidupan nelayan di Kecamatan kotaagung mampu mencukupi ekonomi , sosial, budaya dan agama keluarganya.

Kondisi proses kerjasama antara buruh nelayan dan pemilik bagan di Kecamatan Kotaagung didasarkan pada pola kemitraan dengan dasar kepercayaan, yang mampu mewujudkan keadilan, sehingga pola kemitraan yang muncul di masyarakat nelayan mampu menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan latar belakang kepentingan yang salaing membutuhkan dan mengntungkan yaitu buruh membutuhkan pekerjaan sedangkan pemilik bagan membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola modalnya. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka kemitraan merupakan alternanif yang baik untukm penunjang pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, juga bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* yang dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dan *mudharib*,. Kerjasama dalam ekonomi Islam harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *mudharabah*. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bekerjasama tidak akan mendapatkan bunga akan tetapi akan mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, untuk memperoleh data mengenai bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan antarlain pemilik bagan dan buruh nelayan.

Seperti yang diketahui bahwa bidang perikanan membutuhkan investasi yang cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan

sektor usaha lainnya. Penanaman investasi yang besar mengandung resiko yang lebih besar pula. Oleh sebab itu, para nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap yang lebih sederhana atau hanya menjadi buruh nelayan. Begitulah juga yang terjadi pada masyarakat kotaagung, mereka yang menjadi buruh nelayan lebih dominan dibandingkan dengan pemilik bagan, hal ini disebabkan oleh roda perekonomian secara umum di Kecamatan Kotaagung banyak dilakukan oleh hasil penangkapan ikan.

Adapun sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Menurut bapak H.Rangeng (47 Th) pemilik bagan bekerjasama dengan para buruh nelayan. Bapak H.Rangeng menyatakan bahwa untuk membeli bagan membutuhkan modal yang besar yaitu Rp 6.000.000 lengkap dengan peralatan dan perlengkapan menangkap ikan secara bekas. Perahu bagan ia beli tahun 2010 perahu mampu menampung 3 GT (gross ton). H.Rangeng melaksanakan kerjasama ini sudah berlangsung 6 Tahun. Pembagian hasil yang dipakai dalam kerjasama ini adalah adat kebiasaan masyarakat sekitar. Juragan biasanya ikut melaut, melaut kurang lebih 5-7 hari yang beranggotakan 4 orang buruh nelayan masing-masing buruh nelayan mendapat hasil Rp.375.000/ orang adapun rincian pembagian nya sebagai berikut:

Hasil	=Rp 13.000.000
Biaya Operasional	=Rp 1.000.000 (10%) dari hasil kotor
Bagi Hasil	=Rp13.000.000-Rp1.000.000=Rp.12.000.000
Nisbah	=50:50 (%)
Juragan	=Rp 6.000.000
Buruh nelayan	=Rp.6.000
Buruh nelayan	=Rp 6.000.000:4 = Rp.1.500.000/orang.

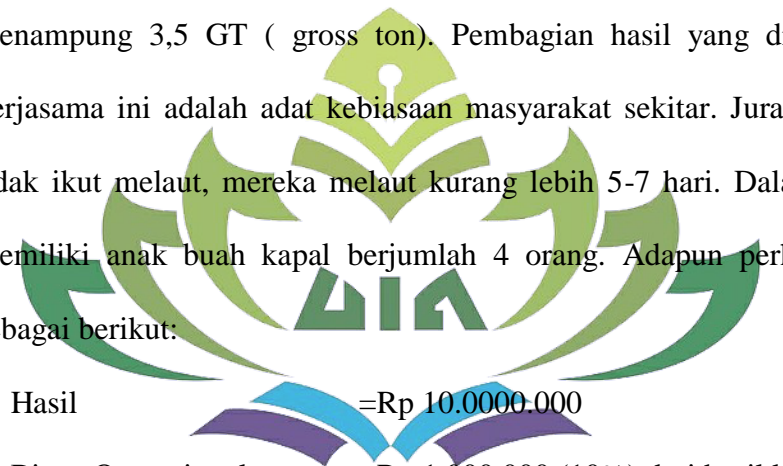
2. Menurut H.Subur (50 Tahun) sebagai pemilik bagan, menyatakan untuk membeli bagan membutuhkan modal yang besar yaitu Rp7.000.000 lengkap dengan peralatan dan perlengkapan menangkap ikan secara bekas. Perahu ia beli tahun 2012 perahun bagan ini mampu menampung kurang lebih 3 GT ( gross ton). Pembagian hasil yang dipakai dalam kerjasama ini adalah adat kebiasaan masyarakat sekitar, melaut kurang lebih 3-7 hari. Dalam bagan ini memiliki buruh bagan yang berjumlah 4 orang. Para buruh nelayan mendapat hasil masing-masing Rp. 1.375.000 orang adapun rincian pembagian nya adalah sebagai berikut:

Hasil	=Rp 12.000.000
Biaya Operasional	=Rp 10.000.000 (10%) dari hasil kotor
Bagi Hasil	=Rp12.000.000-Rp 1.000.000 =Rp 11.000.000
Nisbah	=50:50 (%)
Juragan	=Rp 5.500.000
Buruh Nelayan	=Rp.5.500.000



$$= \text{Rp } 5.500.000 : 4 = \text{Rp } 1.375.000/\text{orang}.$$

3. Sementara itu, terdapat keterangan yang berbeda oleh H.Yusuf (50 Tahun) sebagai pemilik buruh nelayan di kelurahan Baros. Bapak yusuf menyatakan untuk membeli bagan dia membutuhkan modal yang besar yaitu Rp10.000.000 lengkap dengan peralatan dan perlengkapan menangkap ikan. Perahu yang dia beli di tahun tahun 2009, dan melakukan kerjasama ini sudah berlangsung kurang lebih 8 Tahun. perahu bagan ini mampu menampung 3,5 GT ( gross ton). Pembagian hasil yang dipakai dalam kerjasama ini adalah adat kebiasaan masyarakat sekitar. Juragan biasanya tidak ikut melaut, mereka melaut kurang lebih 5-7 hari. Dalam bagan ini memiliki anak buah kapal berjumlah 4 orang. Adapun perhitungan nya sebagai berikut:



Hasil	=Rp 10.000.000
Biaya Operasional	=Rp.1.000.000 (10%) dari hasil kotor
Bagi Hasil	=Rp10.000.000-Rp1.000.000=Rp 9.000.000
Nisbah	= 60:40 (%) dari hasil bersih
Juragan	=Rp 5.400.000 (60%)
Buruh nelayan	=Rp 3.600.000 (40%)
Buruh nelayan	=Rp 3.600.000 : 4 = Rp 900.000/orang.

4. Menurut bapak Tamrin sebagai pemilik bagan menyatakan untuk membeli bagan dia membutuhkan modal yang besar yaitu Rp10.000.000 lengkap dengan peralatan dan perlengkapan menangkap ikan. Perahu yang dia beli di tahun tahun 2009, dan melakukan kerjasama ini sudah berlangsung kurang lebih 8 Tahun. perahu bagan ini mampu menampung 3,5 GT ( gross ton). Pembagian hasil yang dipakai dalam kerjasama ini adalah adat kebiasaan masyarakat sekitar, melaut kurang lebih 5-7 hari. Dalam bagan ini memiliki anak buah kapal berjumlah 4 orang. Adapun perhitungannya sebagai berikut:



Hasil	=Rp 7.0000.000
Biaya Operasional	=Rp.1.000.000 (10%) dari hasil kotor
Bagi Hasil	=Rp7.000.000-Rp1.000.000=Rp 6.000.000
Nisbah	= 60:40 (%) dari hasil bersih
Juragan	=Rp 4.200.000 (60%)
Buruh nelayan	=Rp 2.800.000 (40%)
Buruh nelayan	=Rp 3.600.000 : 4 = Rp 700.000/orang.

5. Menurut bapak Tamsir (40 Tahun) sebagai pemilik bagan menyatakan untuk membeli bagan dengan modal sebesar Rp10.000.000 lengkap dengan peralatan dan perlengkapan menangkap ikan. Perahu ia beli tahun 2004 perahun bagan ini mampu menampung kurang lebih 4 GT ( gross ton). Pembagian hasil yang dipakai dalam kerjasama ini adalah adat kebiasaan masyarakat sekitar. Juragan biasanya ikut melaut, mereka melaut kurang lebih

4-7 hari. Dalam bagan ini memiliki buruh baganyang berjumlah 5 orang.

Adapun rincian pembagian nya adalah sebagai berikut:

Hasil =Rp 19.000.000

Biaya Operasional =Rp 1.000.000 (10%) dari hasil kotor

Bagi Hasil =Rp19.000.000-Rp 1.000.000 =Rp 18.000.000

Nisbah =50:50 (%)

Pemilik Bagan =Rp 9.000.000.

Buruh Nelayan =Rp 7.000.000 : 5=Rp 1.333.000/orang.

**Tabel**  
**Sistem Bgai Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan**  
**Tahun 2016**

	Nisbah	Jumlah buruh	Hasil Jual	Biaya Oprasional	Pemilik bagan	Buruh
1	50:50	4	7.000.000	1.000.000	3.000.000	375.000
2	50:50	4	11.000.000	1.000.000	5.500.000	1.375.000
3	60:40	4	10.000.000	1.000.000	5.400.000	900.000
4	60:60	4	7.000.000	1.000.000	4.200.000	700.000
5	50:50	5	19.000.000	1.000.000	9.000.000	1.333.000

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh para pemilik bagan lebih besar dibandingkan buruh nelayan. Bagi hasil ini dilakukan sudah secara turun menurun, jadi para buruh nelayan hanya bisa menerima dengan ikhlas. Menurut para buruh nelayan, hal tersebut sangat wajar karena ada sebagaian modalnya dikeluarkan oleh pemilik bagan.

**B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus**

Hukum muamalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah ubah dan berkembang dengan berkembangnya zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tetapi dalam kondisi yang lain tidak diperbolehkan.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Al-qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti sunnah rasul. Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang dimasyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut ini penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap praktek kerjasama sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan dalam mencukupi ekonomi keluarga buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung kabupaten tanggamus. Khususnya mengenai akad, modal, pembagian hasil dan keadilan dalam kerjasama dalam pandangan ekonomi Islam.

## 1. Akad *mudharabah*

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas bagi hasil usaha terdapat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *mudharabah* dalam QS. Al-baqarah:283 sebagai berikut:

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ بِهِ....<sup>ص</sup>

(QS. Al-baqarah:283)<sup>ق</sup>

Artinya: *Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam menyukai orang yang melakukan bagi hasil secara *mudharabah*. Bermudharabah juga mencakup perilaku bagi hasil yang dekat dengan nilai-nilai syariah. Maka dari itu sebagai manusia harus melakukan bagi hasil secara *mudharabah* ke sesama manusia. Begitu juga yang harus dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan.

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, akan tetapi akan mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahwa kerjasama antara pemilik bagan dan buruh nelayan yang dilakukan di Kecamatan Kotaagung masuk ke dalam kategori akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang bersal dari *al-qardhu* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk memperoleh keuntungan.

Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik bagan dan buruh nelayan itu termasuk dalam jenis bagi hasil *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibulmaal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam hal ini, apabila pemilik bagan tidak ikut serta melaut para buruh nelayan tidak memiliki batasan selama berlayar. Seperti halnya yang diterapkan oleh pemilik bagan H.Rangeng, H.Subur, H.Yusuf., Tamrin dan Tamsir kepada para buruh nealyannya.

Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, jenis ini merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* dimana *mudharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mall* dalam memasuki jenis dunia usaha. Semisalnya saja ada bagan tidak boleh berlayar di daerah daratan seperti dekat pantai, dermaga dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan rukun *mudharabah* ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu: Rukun yang pertama adalah pelaku, pelaku harus cakap hukum dan baligh. Dalam hal ini pelakunya adalah pemilik bagan dan buruh nelayan. Pelakunya juga rata-rata cakap dan baliqh. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim. Dalam hal ini para pemilik bagan dan buruh nelayan mayoritas adalah muslim. Dalam menjalankan usaha ini, pemilik bagan ikut campur dalam hal penjualan ikan.

Rukun kedua adalah objek *mudharabah* (modal dan kerja). Dalam hal ini pemilik bagan menyerahkan modalnya berupa barang yaitu perlengkapan dengan peralatan dan perlengkapan menangkap ikan. Modal yang dikeluarkan oleh pemilik bagan jelas adanya sehingga dapat membedakan modal dan keuntungannya. Selain itu, masih terkait dengan modal, buruh nelayan tidak diperbolehkan *memudharabahkan* modal yang diberikan oleh



pemilik bagan, buruh nelayan hanya bisa menjalankan modal yang telah diberikan oleh pemilik bagan dalam batas perahu bagan tersebut.

Kontribusi buruh nelayan dalam bentuk kerja. Dalam hal ini, buruh nelayan menjalankan usaha sesuai dengan syariah yaitu dengan cara tidak melakukan kecurangan yang menyembunyikan sedikit ikan tanpa sepengetahuan pemilik bagan. Hal itu disebabkan karena adanya sistem kepercayaan. Namun demikian kerjasama ini tidak memiliki perjanjian tertulis, hanya mempunyai sistem kepercayaan saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik bagan, berdasarkan pengalaman selama ini baik bagan maupun buruh nelayan tidak melakukan maupun pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati.

Rukun ketiga adalah ijab kabul. Dalam hal ini, berdasarkan ijab dan kabul yang dilakukan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan adalah tidak teretulis. Berdasarkan wawancara dengan pemilik bagan dan buruh nelayan, adapun ijab dan kabul yang disepakati antara pemilik bagan dan buruh sepakat dengan penentuan bagi hasil 50:50 dan 60:40 karena bagi hasil tersebut sudah dilakukan secara turun menurun. Pemilik bagan sepakat bahwa ia akan menanggung semua biaya operasional, kerusakan dan lain-lain.

Rukun keempat adalah nisbah keuntungan. Dalam hal ini pemilik bagan dan buruh nelayan mebagi hasil keuntungan secara bersama-sama sehingga tidak ada yang ditutupi.

Perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik bagan tidak menyebutkan berapa nominal hasil yang harus diberikan buruh nelayan kepadanya. Itu semua tergantung dari hasil penangkapan ikan. Nisbah bagi hasil yang disepakati antara pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung adalah 50:50 dan 60:40.

Berdasarkan beberapa rukun *mudharabah* yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa rukun akad *mudharabah* antara pemilik bagan dan buruh telah terpenuhi.

Mengenai biaya operasional dalam perjanjian kerjasama, Menurut imam malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga kemungkinan memperoleh keuntungan berikutnya. Sedangkan menurut Imam Hambali adalah sebagai berikut:

- 6) *Shahibul maal* mengeluarkan 100% kebutuhan suatu proyek kerjasama, sedangkan *mudharib* hanya sebagai pengelola usaha.
- 7) Jangka waktu usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama .
- 8) Jumlah pembiayaan harus dinyatakan secara tunai.

- 9) *Shahibul maal* menanggung segala kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika kerugian usaha tersebut terjadi atas kelalaian pengelola.
- 10) Biaya operasional di bebaskan kepada *mudharib*.

Dalam hal ini mengenai biaya operasioanal ,pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung sama-sama mengeluarkannya, yang didasrkan atas perjanjian bersama.

berakhirnya *akad/perjanjian* bagi hasil dalam *syari'at* Islam terjadi apabila sedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri kerjasama tersebut, karena salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia, gila, murtad atau modal telah habis duluan oleh pengelola. Sedangkan bagi hasil kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kotaagung, yaitu apabila modal awal yang diberikan oleh pemilik modal dicabut oleh pemilik modal sendiri atau pengelola sendiri yang mengembalikannya kepada pemilik serta bagi hasil pemilik yang telah disepakati. Sebab praktik bagi hasil yang terjadi di Kotaagung tersebut, seringkali berakhir seperti yang peneliti jelaskan di atas

## 2. Akad *syirkah*

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengeanai aktivitas bagi hasil usaha terdapat dalam Al-qur'an yang mejelaskan tentang *syirkah* adalah sebagai berikut:

.....﴿١٢﴾ تَرَكَنْ مِمَّا الرُّبُوعُ فَلَكُمْ وُأْدَلَّهُمْ ۚ كَانَ فَاِنْ.....

(QS:An-Nisa:12)

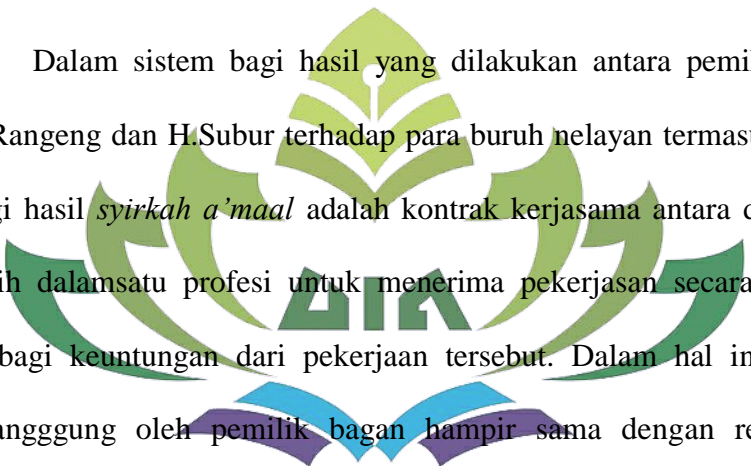
*Jikalau saudara-saudar lebih dari seorang maka, mereka bersekutu yang sepertig.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menyukai orang yang melakukan bagi hasil secara *syirkah*. *Bersyirkah* juga mencakup perilaku bagi hasil yang dekat dengan nilai-nilai syariah. Maka dari itu kita sebagai manusia harus melakukan bagi hasil secara *syirkah* ke sesama manusia. Begitu juga yang harus dilakukan oleh pemilik bagan dan bauruh nelayan.

Konsep *syirkah* dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama usaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahwa kerjasama antara pemilik bagan dan buruh nelayan dilakukan oleh para pemilik bagan yaitu H.Rangeng dan H.Suburr kepada para buruh nelayannya kedalam kategori *syirkah*. Akad *syirkah* menurut bahasa artinya *al-ikthilat* yang artinya campur atau percampuran. Sedangkan menurut istilah *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungannya ditanggung bersama.

Dalam hal ini pemilik bagan dan buruh nelayan sama-sama mengeluarkan modal. Modal yang dikeluarkan oleh pemilik bagan adalah berupa barang yaitu perahu bagan dengan alat dan perlengkapannya. Sedangkan modal yang dikeluarkan oleh buruh nelayan adalah berupa ransum/bekal selama melaut dan juga tidak bentuk barang, keahlian dalam mengelolah modal yang telah diberikan pemilik bagan yaitu keahlian dalam menangkap ikan.



Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik baganyaitu H.Rangeng dan H.Subur terhadap para buruh nelayan termasuk dalam jenis bagi hasil *syirkah a'maal* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dalamsatu profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Dalam hal ini resiko yang ditanggung oleh pemilik bagan hampir sama dengan resiko yang di tanggung oleh buruh nelayan.

Dalam kaitannya dengan syarat-syarat ada beberapa yang harus dipenuhi yaitu: syarat pertama adalah pelaku. Pelaku harus baligh dan berakal sehat. Dalam hal ini pelakunya adalah pemilik bagan dan buruh nelayan, pelaku berakal sehat dan baliqh. Sarat kedua adalah barang yang dapat diharhgai dengan uang. Dalam hal ini pemilik bagan memberikan modal sebuah perahu bagan dengan alat tangkap ikan buakan nerupa uang.

Berdasarkan beberapa syarat *syirkah* yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa syarat akad *syirkah* antara pemilik bagan dan buruh nelayan telah terpenuhi.

Sedangkan dalam kaitannya dengan sistem bagi hasil usaha antara pemilik bagan dan buruh nelayan seharusnya memenuhi nilai keadilan ekonomi Islam. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran islam terutama dalam kehidupan hukum Islam, politik dan ekonomi.

Keadilan sebagai bentuk dari nilai ekonomi dikatan bahwa prinsip kedilah dari bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan belum sepenuhnya terpeuhi. Adapaun keadilan dalam Islam memilik implikasi yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan kontribusi pendapatan.

Pertama terkait dengan keadilan sosial. Konsep ini seharusnya membawa kesejahteraan karena kesejahteraan sangat tergantung pada diberlakukannya hukum allah dan dihilangkannya ketidak adilan. Kedaan buruh nelayan berbanding terbalik dengan pemilik bagan. Keadaan buruh nelayan banyak yang tidak sejahtera dibandingkan dengan pemilik bagan. Hal ini terlihat dari kondidi rumah nelayan rata-rata bendinding dan betlantai semen dan kondidi anaknya nya rata –rata tamat SMP dan mayoritas keluarganya masuk di kategori keluarga sejshtera II.

Kedua terkait dengan konsep keadilan ekonomi. Konsep ini dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan hak dan tidak mengambil hak orang lain. Hal ini berlaku di masyarakat pemilik bagan dan buruh nelayan, dalam hal ini dapat dikatakan secara umum pemilik bagan memenuhi kontrak yang telah disepakati oleh buruh nelayan. Mereka telah mendapatkan haknya berupa uang walaupun hal tersebut belum memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga mereka. Meski demikian, sistem bagi hasil dengan nisbah 50:50 dan 60:40 tersebut harus diterima oleh buruh nelayan karena menurut mereka daripada tidak ada sumber pendapatan yang lain.

Ketiga terkait dengan konsep keadilan kontribusi pendapatan. Konsep keadilan pendapatan dalam Islam serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda. Pendapatan yang diterima oleh buruh nelayan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Pekerjaan sebagai buruh nelayan sangatlah menguras tenaga, menaruh nyawa dan lain-lain. Sedangkan hasil yang mereka peroleh tidak sesuai yang mereka inginkan.

Seperti yang terjadi kepada buruh nelayan yang bernama Irul. Ia melaut selama 3-7 hari hanya mendapatkan hasil Rp.700.000. Dengan pendapatan sebesar itu seluruh buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung



tidak sejahtera, sedangkan kesejahteraan akan diperoleh jika perlakuan adil diterapkan dalam sistem kerjasama. Namun sebagian buruh nelayan merasa tercukupi kebutuhan hidupnya dengan adanya kerjasama tersebut.<sup>72</sup>

Jika dikaitkan dengan masing-masing konsep keadilan diatas, maka dapat dikatakan bahwa nilai keadilan sebagai implikasi dari nilai keadilan sosial, nilai keadilan ekonomi dan nilai keadilan pendapatan sebagai implikasi dinilai keadilan bagi para buruh nelayan belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti porsi bagi hasil 60:40 dan 50:50 yang diterapkan oleh para pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung, sistem bagi hasil tersebut sudah lama dilakukan secara turun menurun.

Berdasarkan hasil pembahasan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil, baik dalam akad *mudharabah* maupun *musyarakah*, maka dapat dikemukakan bahwa nisbah bagi hasilnya tetap 60:40 dan 50:50 baik pemilik bagan ikut serta melaut ataupun tidak.

---

<sup>72</sup> Wawancara Kepada Bapak Irul, Buruh Nelayan di Kecamatan Kotaagung, Pada Tanggal 21 Oktober 2016, Pukul 16:15

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data data yang diperoleh dari dalam penelitian maka, sebaagimana penutupan pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

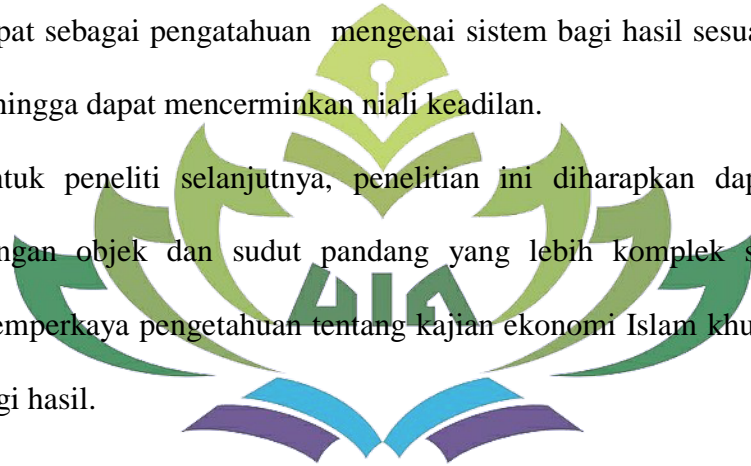
1. Sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh di Kecamatan Kotaagung kabupaten tanggamus belum sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil yang berdasarkan akad *mudharabah* dan *syirkah*, mereka masih menggunakan akad kerjasama secara turun menurun. Sistem pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh buruh nelayan dan pemilik bagan di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus adalah 50:50 dan 60:40. Sistem bagi hasil ini diterapkan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan, baik yang ikut terlibat maupun tidak.
2. Sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh di Kecamatan Kotaagung kabupaten tanggamus, pada kenyataannya belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan Islam yang merupakan aplikasi dari terpenuhinya keadilan sosial, keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan, sehingganya dengan kerjasama ini tidak dapat membantu kehidupan ekonomi para buruh nelayan untuk sejahtera. Namun, dengan kerjasama tersebut dapat membantu

pemilik bagan dan buruh nelayan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk menanamkan wawasan dan pengetahuan yaitu:

1. Untuk pemilik bagan dan buruh nelayan hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengetahuan mengenai sistem bagi hasil sesuai syariat Islam sehingga dapat mencerminkan nilai keadilan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang lebih kompleks sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya tentang bagi hasil.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi susono, *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi Pendidikan Dan Dakwah)* ,Gema Insani Pers, Jakrata, 1998,
- Adi Warman A.Karim, *Bank Islam(Analisis Fiqh Dan Keuangan)* Edisi Ketiga,PT.Raja Grafindo Jakarta, 2010.
- Afzalurrahman, *Economic Doctrin Of Islam*,Jilid II,Terj.Soeroyo, Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam,PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995
- Ali Yafe'i, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Sosial Lingkungan Asuransi Sehingga Ukhuwah*, Bandung,1994.
- Amalia, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Integrasi*, LkiS, Yogyakarta, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo,Persada,jakarta, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Biro Pelaporan Dan Statistik, *Petunjuk Teknis Pendidkan Keluarga Sejahtera*, BKKBN, Jakarta,1997.
- Chairun Persada,*Hukum Perjanjian Dalam Islam*,Sinar Grafika,Jakarta,1994.
- Deasy Yulinawati, *Analisis Pendapatan Dari Sistem Pembagian Hasil Nelayan Bermotor 5 GT dan 5-9 GT Tanjung Balai Provinsi Sumatera utara*, Hasil Penelitian, 2008
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*,Gramedia PustakaUtama,Jakarta,2003.

HB.Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University press, Surakarta,2002 .

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*,Edisi Ke-1,2,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2006.

Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Gema Insani, Jakarta, 1998..

Lexy j.Meleong, *Metode Kualitatif*,PT.Remaja Rosdakarya,Bandung,2002.

Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syari'ah*, Zikrul hakim,2010.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syari'ah Cet Pertama*,UII Press,Yogyakarta.

Muhammad Ridwan Alimuddin, *Kita Belum cinta Laut*, Bahari, Yogyakarta, 2004.

Muhammad Syafi'i, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Gema Insani, Jakarta,1998.

Soeratno, Lincolin,Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*,Yogyakarta, 2008

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet Ke-14, Bandung, 2009.

Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta,2006.

Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,2011.

Sumitro maksum, *penyuluhan masyarakat di negara sedang berkembang, Cet Ke III*, Pustaka Pengembangan Nusantara , Jakarta 1994.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,Jilid 1,ANDI,Yogyakarta,2002.

Syalabi, *Kesejahteraan Dan Indikator Kesejahteraan*, Tersedia di [Http//](http://Syalabi.Net,Com)

Syalabi.Net,Com,Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2016 Pukul.11.30

V.Wiratna Sujarweni, *Metode penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka

Pelajar,yogyakarta,2015.







## **PANDUAN WAWANCARA KEPADA PEMILIK BAGAN**

1. Apakah akad yang disepakati dalam kerjasama yang dilakukan anda?
2. Sebagai pemilik bagan dalam bentuk apa saja modal usaha yang anda berikan dalam kerjasama ini?
3. Apakah perjanjian kerjasama yang dijalankan oleh anda sebagai pemilik bagan dengan memberikan seluruh modal, keuntungan dibagi bersama sedangkan kerugian ditanggung oleh anda?
4. Apakah menurut anda sebagai pemilik bagan kerjasama yang di jalankan anda sudah dirasa adil dan menguntungkan?
5. Siapakah yang menanggung seluruh biaya-biaya dalam kerjasama ini?
6. Apabila terjadinya kerusakan pada perahu bagan, siapakah yang bertanggung jawab?
7. Bagaimana mekanisme penentuan bagi hasil yang disepakati?
8. Berapakah nisbah bagi hasil yang di tetapkan dalam kerjasama ini?
9. Apakah menurut anda sistem bagi hasil yang disepakati selama ini sudah transparan dan adil?
10. Apakah pembagian hasil dari kerjasama dalam usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan batas waktu yang disepakati?
11. Apakah berakhirnya perjanjian kerjasama di tentukan di dalam akad?
12. Sebagai pemilik bagan apakah penghasilan yang diperoleh dari sistem kerjasama yang dilakuakn mampu memenuhi kebutuhan papan dan pendidikan keluarga anda?
13. Menurut anda apakah penghasilan anda dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga anada?

## **PANDUAN WAWANCARA KEPADA BURUH NELAYAN**

1. Apakah batas waktu kerjasama di tentukan di dalam akad?
2. Sebagai buruh dalam bentuk apa saja modal usaha yang anda berikan dalam kerjasama ini?
3. Apakah keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian anda ditanggung oleh anda sendiri sebagai buruh?
4. Apakah menurut anda sebagai buruh kerjasama yang dijalankan sudah dirasa adil dan menguntungkan?
5. Apakah biaya-biaya diambil dari keuntungan yang didapatkan?
6. Bagaimana jika kerusakan bagan tersebut di akibatkan oleh kealahan ataupun kelalaian anda sebagai buruh bagan?
7. Apakah keuntungan yang didapat dalam kerjasama di ketahui secara jelas?
8. Apakah nisbah bagi hasil di dalam kerjasama ini di sepakati bersama dan menguntungkan anda tanpa menguntungkan sebelah pihak?
9. Apakah anda sudah merasa puas dengan sistem pembagian hasil yang disepakati dalam kerjasama ini?
10. Bagaimana jika terjadi pelanggaran dalam hal pembagian hasil, atau tidak sesuai dengan batas waktu yang disepakati?
11. Apakah faktor penyebab berakhirnya perjanjian kerjasama?
12. Sebagai buruh apakah penghasilan yang diperoleh dari sistem kerjasama yang dilakuakn mampu memenuhi kebutuhan papan dan pendidikan keluarga anda?
13. Bagaimana tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga anda?